

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis sangat cepat dan semakin kuat, mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus melakukan berbagai macam inovasi untuk memperbaiki kinerja dan memperluas usaha perusahaan supaya mampu bersaing dan bertahan dalam dunia bisnis. Untuk tetap bertahan, setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik untuk bisa bersaing maupun bertahan dalam persaingan bisnis dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Kinerja keuangan perusahaan adalah cerminan dari seberapa baik pengelolaan perusahaan yang mengacu pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perusahaan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya (Ratna, 2019).

Kinerja keuangan merupakan salah satu acuan utama dalam mengukur baik atau tidaknya suatu perusahaan, di mana hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam mengukur kinerja keuangan dapat

dihitung melalui dua sisi yaitu sisi internal dari perusahaan tersebut dengan melihat laporan keuangannya, sedangkan dari sisi eksternal yaitu dengan nilai perusahaan dengan menghitung kinerja keuangan suatu perusahaan Saifi dan Sarafina (2017).

Salah satu sistem yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik. Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan di mana istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, di mana kepemimpinan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.

Pemisahan ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan (manajemen atau direksi). Dalam hal ini dimungkinkan adanya sikap yang berbeda antara pemilik perusahaan dengan direksi dalam pengelolaan perusahaan termasuk sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalisasi dengan mekanisme tata kelola yang baik. *Corporate governance* akan menjadi jembatan pemisah antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham dalam pengelolaan suatu perusahaan dan

memberikan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan melakukan pengelolaan bisnis termasuk didalamnya pengelolaan risiko (Setiawan, 2016).

Salah satu contoh dampak lemahnya kinerja keuangan dan implementasi tata kelola perusahaan adalah terjadinya kasus mengenai kinerja keuangan di PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2017, kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya tertekan. Hal ini terlihat dari laba bersih perusahaan yang anjlok 98,46% menjadi Rp. 328,43 miliar. Tahun sebelumnya Jiwasraya mencatatkan laba bersih Rp 2,14 triliun. Permasalahan perusahaan mengalami kinerja keuangan yang kurang baik karena tata kelola perusahaan yang kurang baik seperti komisaris independen, dewan direksi dan komite audit.

Komisaris independen merupakan pihak dari eksternal perusahaan yang bertindak sebagai penengah atau pengendali jika terdapat perselisihan antara para manajer internal dan juga bertindak dalam mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan saran, nasihat dan masukan kepada pihak manajemen apabila dipandang perlu. Komisaris independen merupakan posisi terbaik dalam melaksanakan tugas fungsi monitoring atau pemantauan dalam kinerja keuangan demi tercapainya *corporate governance* yang baik dalam perusahaan.

Komite audit dalam perusahaan bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan serta mengawasi audit internal dan eksternal. Berkaitan dengan komite audit, terdapat penelitian yang mengatakan adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi (Astri, 2016).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji variabel komite audit namun hasil yang diperoleh berbeda-beda.

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perusahaan. Dewan direksi yang melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Hendratni *et al.*, (2018) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan berbeda dengan penelitian Rokhman (2019) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rinova dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan berbeda dengan yang dijelaskan oleh penelitian Eksandy (2018) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Mira dan Meina (2019) menjelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan berbeda dengan yang dijelaskan oleh penelitian Tulung, dkk (2020) bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tabel 1.1
Perkembangan Rata-Rata Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Keuangan Dan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Proporsi Dewan Komisaris Independen	60,19	60,18	55,41
Jumlah Komite Audit	8,79	8,79	9,14
Jumlah Dewan Direksi	4,79	4,21	4,21
ROA	2,22	2,26	2,42

Sumber: idx.co.id 2022 (data diolah kembali)

Data tabel 1.1 dapat dilihat bila *corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan jumlah dewan direksi dalam keadaan naik maka ROA akan naik dan apabila proporsi dewan komisaris, jumlah komite audit dan jumlah dewan direksi dalam keadaan turun maka ROA akan turun. Namun data tersebut pada tahun 2020 ketika proporsi dewan komisaris independen mengalami penurunan sebesar 60,18 tetapi ROA mengalami kenaikan menjadi 2,26 dan pada tahun 2021 ketika dewan komisaris independen mengalami penurunan sebesar 55,41 tetapi ROA mengalami kenaikan menjadi 2,42. Pada tahun 2019 ketika jumlah dewan direksi mengalami penurunan sebesar 8,79 tetap ROA mengalami kenaikan menjadi 2,22. Sedangkan pada tahun 2020 ketika jumlah komite audit mengalami penurunan sebesar 4,21 tetapi ROA mengalami kenaikan menjadi 2,26.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda, maka penulis tertarik ingin melakukan perbandingan untuk memperoleh informasi sejauh mana pengaruh penerapan *corporate governance* bagi keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan yang memang sudah menerapkan prinsip *corporate governance* terutama dalam perusahaan keuangan dan asuransi. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, dewan direksi dan kinerja keuangan. Penelitian ini mengambil obyek perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 3) Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Untuk mahasiswa penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Untuk universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan pandangan terhadap pengembangan keuangan khususnya mengenai kinerja keuangan serta mampu menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi kepada para investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi atau kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan mengenai kinerja

keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi dan pemahaman tentang kinerja keuangan untuk membantu memperbaiki praktek kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi sebagai dasar dalam memahami *good corporate governance*. Menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Principal* berharap agar manajemen bertindak sesuai kepentingan mereka dan mampu menggunakan sumber daya yang dipercayakan semaksimal mungkin sehingga mereka termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer termotivasi untuk memaksimalkan diri dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di mana masing-masing pihak berusaha mencapai keinginan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* inilah yang disebut dengan *agency problems*. *Agency problems* ini dapat semakin meningkat karena

adanya asimetri informasi yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent* akibat adanya kesulitan *principal* untuk melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. *Principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai keinginan *principal* sehingga *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. *Agency problem* dapat menurunkan kualitas laporan keuangan sehingga dalam kondisi seperti ini diperlukan mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. *Good corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang mengatur pola hubungan antara para pemangku kepentingan perusahaan dan melindungi kepentingan para pemegang saham diharapkan dapat membantu mengurangi adanya *agency problem* agar dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan berkualitas (Ratna, 2019)

Good Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah - masalah yang ada di dalam hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang

telah ditanamkan oleh investor. Dengan kata lain yakni *corporate governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas. Kinerja suatu perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan, dari situlah diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu (Ratna, 2019).

Dalam sebuah perusahaan manajer biasanya menggunakan metode dalam menghitung atau menganalisis kinerja keuangannya dalam setiap kinerja memiliki metode penghitungan masing-masing dan dalam perusahaan manajer mengukur kinerja perusahaannya dengan menggunakan rasio untuk mengukur ukuran kinerja tersebut. Analisis rasio pada laporan keuangan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu dan kegiatan operasinya selama beberapa periode lalu. Namun, nilai riilnya ada pada kenyataan bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan laba dan deviden masa depan. Dari sudut pandang investor, peramalan masa depan adalah inti dari analisis keuangan yang sebenarnya. Sementara itu, dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan, yang lebih penting lagi

adalah sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki kinerja dimasa depan (Ronni, 2019).

Kinerja keuangan diwujudkan dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan karena setiap kegiatan tersebut memerlukan sumber daya untuk mencapaitujuan perusahaan. Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja sesuatu perusahaan.

Adapun manfaat dari melakukan kinerja keuangan bagi perusahaan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah di capai dalam setiap periode tertentu.
2. Digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
4. Dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan.
5. Sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan.
6. Memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan devisi perusahaan pada khususnya.

2.1.3 Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal dengan Cadbury Report (Tjoger dkk, 2003). Laporan ini dipandang sebagai titik tolak (*turning point*) yang sangat menentukan praktik *Corporate Governance* diseluruh dunia.

Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan.

Good Corporate Governance merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, di mana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi yang wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. *Good Corporate Governance* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU.2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

2.1.4 Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Corporate Governance* di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-16/MMBU/2012 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu:

1. *Transparency* (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. *Independency* (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5 Manfaat Penerapan Corporate Governance

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan berlaku. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Meningkatkan efisiensi produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh individu dalam perusahaan memiliki komitmen untuk memajukan perusahaan. Semua individu di perusahaan pada setiap level dan departemen akan berusaha menyumbang segenap kemampuannya untuk kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan yang diakibatkan penggunaan sumber daya perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan.

- 2) Meningkatkan kepercayaan publik dalam hal ini dapat berupa mitra baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, pemerintah maupun konsumen akhir. Bagi investor dan kreditor penerapan good corporate governance adalah suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Jadi kreditor dan investor akan merasa lebih aman karena perusahaan dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak dan bukan hanya pihak tertentu saja.
- 3) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan
- 4) Dapat mengukur target kinerja perusahaan

2.1.6 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Adrian Sutedi (2011: 41-42) ada beberapa unsur dalam *corporate governance* yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* :

- 1) *Corporate Governance* - Internal Perusahaan perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan.

Unsur-unsur internal perusahaan tersebut sebagai berikut:

- a) Pemegang saham
- b) Direksi
- c) Dewan komisaris
- d) Manajer

- e) Komite audit
- 2) *Corporate Governance* - External Perusahaan Unsur - unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance* - External Perusahaan.

Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah antara lain : a) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, b) Investor, c) Institusi penyedia informasi, d) Akuntan publik, e) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, f) Pemberi pinjaman, g) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.1.7 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dari berbagai unsur *Corporate Governance* yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan terfokus pada Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit.

1. Komisaris Independen

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Sesuai yang tertera dalam KNKG (2006), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham terkendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata mata demi kepentingan perseroan.

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Jumlah komisaris independen paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Saragih dan Sembiring, 2019). Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

2. Komite Audit

Berperan dalam optimalisasi mekanisme pengawasan internal perusahaan. Komite Audit juga menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris dengan auditor internal. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengartikan Komite Audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* dalam perusahaan-perusahaan Muh. (Ariet Effendi, 2009: 25). Menurut Menurut Greuning dan Bratanovic (2011:57-58) Komite Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut ini: a) Memeriksa prosedur kebijakan-kebijakan dewan dan manajemen, serta membuat laporan berkala untuk dewan. b) Memastikan berlangsungnya tata kelola perusahaan, sistem kontrol, dan proses manajemen risiko. c) Memastikan kecukupan dan ketepatan informasi yang dilaporkan kepada manajemen. d) Membantu komunikasi antara dewan direksi dan manajemen. c) Mengevaluasi langkah-langkah manajemen risiko terkait ketepatan dalam hubungannya dengan pemaparan. f) Menilai semua aspek kegiatan dan posisi risiko, memastikan keefektifan kontrol manajemen terkait posisi, batas, dan tindakan yang diambil. g) Menilai operasi serta memberikan saran perbaikan. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang berasal dari luar perusahaan

dan seorang Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan. Dewan Direksi berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Wallace dan Zinkin dalam Ahmad Minan Santoso (2015: 22), direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota Dewan Direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan. Adapun ketentuan jumlah minimal Dewan Direksi yang disyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu minimal 2 orang.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dicantumkan dengan jelas dalam sebuah penelitian agar terhindar dari plagiat. Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian yang

relevan dapat diketahui metode apa yang telah digunakan, hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, bagian mana dari penelitian sebelumnya yang belum terselesaikan, faktor-faktor yang mendukung dan perencanaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Karina dan Khoirunnisa (2021) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Khoirunnisa (2021) sama-sama menggunakan variabel dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

Rinova dan Prasetyo (2021) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu ukuran dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan

direksi dan frekuensi rapat dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Arizona, *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, variabel dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arizona, *et al.*, (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan direksi dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel komisaris independen. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Tulung, *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan komite pemantau resiko serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan komite pemantau risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulung, *et al.*, (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan direksi dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel komisaris independen. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Ratna (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu komisaris independen, dewan direksi dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel dewan direksi yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sedangkan variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2019) adalah sama-sama menggunakan variabel komisaris independen, dewan direksi dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

Saragih dan Sembiring (2019) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu komisaris independen dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan secara simultan dan parsial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Sembiring (2019) sama-

sama menggunakan variabel komisaris independen dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel dewan direksi. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Mardianti (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi dan leverage serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardianti (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dewan direksi dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel komisaris independen. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Rokhman (2019) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan direksi, komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil lainnya seperti komisaris independen dan kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rokhman (2019) sama-sama menggunakan variabel komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

Hendratni, *et al.*, (2018) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendratni, *et al.*, (2018) sama-sama menggunakan variabel dewan direksi dan komisaris independen. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel komite audit. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Eksandy (2018) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja

keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

Saifi dan Sarafina (2017) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu dewan komisaris independen dan komite audit serta 2 (dua) variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifi dan Sarafina (2017) adalah sama-sama menggunakan variabel komisaris independen dan komite audit. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel dewan komisaris. Perbedaan lainnya adalah periode penelitian.

Setiawan (2016) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu komisaris independen, dewan direksi dan kepemilikan institusional serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan kepemilikan institusional

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) adalah sama-sama menggunakan variabel komisaris independen dan dewan direksi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian.

